



**ANALISIS DAMPAK DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT NAGARI BATIPUAH BARUAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

**OLEH:**

**EKA RAMAYANA**  
**NIM. 1730402022**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022M/1443H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ramayana  
NIM : 1730402022  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Eka Ramayana**  
**NIM. 1730402022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

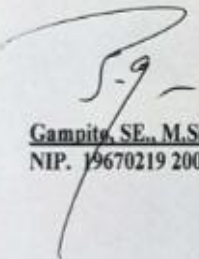
Pembimbing penulisan skripsi atas nama Eka Ramayana NIM: 1730402022 dengan judul "Analisis Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

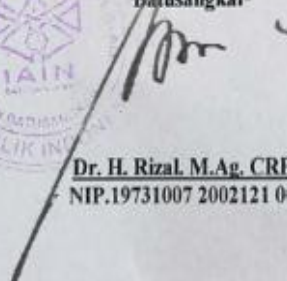
Pembimbing

  
Gampita, SE., M.Si  
NIP. 19670219 200501 1 005

  
Dr. H. Syukri Iska, M.Ag  
NIP. 19631019192031004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar






  
Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP\*  
NIP.19731007 2002121 001

#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Eka Ramayana, NIM 1730402022, dengan judul, "Analisis Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah", telah diujikan dalam sidang *Munawasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Syariah.

Demikian pengesahan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag 19631019 199203 1 004	Ketua Sidang		15-02-2022
2	Gampito, SE., M.Si 19670219 200501 1 005	Anggota		
3	Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP 19860817 201903 2 006	Anggota		14/2-2022

Batusangkar, Januari 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP@  
NIP.19731007 2002121 001

## ABSTRAK

**Eka Ramayana, Nim 1730402022, Judul Skripsi “Analisis Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah”** Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan Nagari Batipuah Baruah tiap tahunnya mengalami penurunan yang mana penurunan ini disebabkan oleh adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Akan tetapi dilihat dari angka kemiskinan Nagari Batipuah Baruah masih tinggi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (File Research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini masyarakat yang terkait dana PNPM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner sebanyak 30 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 26.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hubungan yang antara dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah, hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana hasil yang diperoleh pada variabel dana PNPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3,069, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,069 > 1,701$ ) maka dapat dikatakan variabel dana PNPM berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kepercayaan 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga menyatakan bahwa ada pengaruh dana PNPM dengan kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah.

Kata Kunci: Dampak Dana PNPM, Kesejahteraan Masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	10
G. Defenisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. PNPM.....	13
2. Kemiskinan.....	26
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	29
B. Penelitian Yang Relevan.....	37
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Hipotesis .....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Instrumen Penelitian .....	42

E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Temuan Penelitian .....	47
1. Gambaran Umum Nagari Batipuah Baruah .....	47
B. Karakteristik Responden.....	53
C. Pengujian Validitas .....	55
1. Uji Validitas .....	55
D. Hasil Penelitian .....	56
1. Uji Asumsi Klasik .....	56
2. Uji Hipotesis.....	58
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dana BLM yang Dikelola PNPM Nagari Batipuah Baruah .....	6
Tabel 1. 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar .....	8
Tabel 1. 3 Angka Kemiskinan Kecamatan Batipuah Baruah.....	8
Tabel 1.4 Persentase Angka Kemiskinan Nagari Batipuah Baruah Tahun 2017- 2019 .....	8
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia. ....	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdsarkan Pendidikan Terakhir .....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdsarkan Jenis Pekerjaan. ....	54
Tabel 4. 4 Uji Validitas Dana PNPM.....	55
Tabel 4. 5 Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat.....	56
Tabel 4. 6 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
Tabel 4. 9 Uji t (Parsial).....	58
Tabel 4. 10 Uji Linier Sederhana .....	59



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau biasa disingkat PNPM merupakan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Program ini sejatinya dijalankan guna mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan hingga kemandirian masyarakat pedesaan (Taufik, 2015, hal. 193).

Program pemberdayaan ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan terbesar di Indonesia. Pasalnya, program ini memprioritaskan kegiatan di bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Adapun program ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang diperuntukkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif serta kegiatan pelatihan masyarakat (Rachmad, 2015: 29).

Dan pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia merancang PNPM yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Sasaran program ini adalah desa-desa yang penduduknya kurang mampu, salah satunya Nagari Batipuah Baruah. Alasan sebuah desa yang menjadi prioritas program ini dikarenakan lapisan masyarakat yang terdapat dimasyarakat tersebut memiliki pekerjaan dan penghasilan yang beragam, mulai dari petani, pedagang, buruh dan lain sebagainya.

Untuk itu, upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, program ini ditujukan untuk orang-orang miskin, memberikan bantuan beras, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan.

Kedua, program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat seperti pengurangan biaya sekolah (BOS) dan pelayanan kesehatan. Dalam mengurangi masalah kemiskinan, diperlukan tiga strategi utama yaitu dengan memberikan bantuan sosial seperti memberikan akses rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu strategi pelayanan kesehatan, pendidikan, air hingga kebutuhan gizi. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi. Selanjutnya memberikan bantuan berupa kredit bagi pelaku usaha ekonomi mikro (Utama, 2019, hal. 848).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu sendiri juga menganut azas kekeluargaan serta sesuai dengan hukum perundang-undangan negara. Sehingga semua transaksi yang ada dalam PNPM tersebut berprinsip atas dasar kekeluargaan, undang-undang dan juga menggunakan prinsip syariah. Yakni transaksi yang berbentuk pinjaman dinilai sah jika transaksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Dalam ajaran Islam juga dijelaskan dan diwajibkan membantu sesama saudara yang lemah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٦﴾

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*

Ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari haruslah tolong-menolong dalam hal-hal yang baik. Agar bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan.

Sesuai dengan ayat tersebut, bahwa manusia saling membutuhkan dalam hal yang bermanfaat seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian menitikberatkan pada pemberi pertolongan itu dapat dijelaskan bahwa pinjaman meminjam menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan atau menarik manfaat dari pihak yang berhutang karena kaidah hukum Islam menetapkan “setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba”, bahkan dalam ajaran Islam berkecendrungan untuk memberi kelonggaran-kelonggaran apabila yang berhutang benar-benar tidak mampu dan pinjam meminjam di tulis agar tidak terjadi kelupaan sesuai dengan akad yang disepakati.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan (akad) tersebut maka bisa dianggap batal atau tidak sah. Untuk itu, kedudukan akad sangatlah penting dalam melakukan sebuah transaksi yang berprinsip kepada syariah. Salah satu akad yang digunakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam melakukan transaksi pembiayaan adalah jasa pinjaman atau bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 12. Pasal tersebut berbunyi: “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Program ini juga memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin yang terdapat di pedesaan. Hal ini mendorong kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan serta pengelolaan pembangunan. Pada dasarnya tujuan dana PNPM Mandiri sangat mulia, dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan modal untuk memulai, mengembangkan usaha agar mampu meringankan penderitaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masyarakat juga harus dibantu guna menghindari terjadinya keterpurukan, kelangsungan hidup mereka dan kelangsungan beragama dan bernegara. Dengan demikian, adanya program PNPM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga PNPM dianggap mampu memberikan masalah kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Nagari Batipuah Baruah.

Dalam pelaksanaannya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini memprioritaskan kegiatan dalam bidang pinjaman bergulir yang diperuntukkan khusus bagi kelompok perempuan. Program ini biasanya juga disebut dana bergulir.

Dengan adanya kegiatan pinjaman dana bergulir ini yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dengan skala mikro di wilayah Nagari Batipuah Baruah ini dilakukan, dimana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berada dengan ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya (Sepia, 2019, hal. 1).

Meski pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin berupa pinjaman mikro, pada PNPM Mandiri

Perdesaan bukan menjadi program keuangan mikro ataupun menjadi lembaga keuangan mikro. Pasalnya, program PNPM Mandiri Perdesaan ini bukan diperuntukkan bagi kepentingan pengelola semata. Program ini juga bukan menjadi milik individu. Namun program ini merupakan program pemerintah yang selalu membangun dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengembangkan ekonomi lemah, terutama bagi pedagang kecil yang terdapat di Nagari Batipuah Baruah. Untuk itu, dengan adanya program ini juga diharapkan dapat membantu dan meringankan serta memberikan modal yang bersifat sementara bagi para usahawan dengan tujuan agar dapat meningkatkan penghasilan, terutama pedagang kecil dan masyarakat miskin (Sepia, 2019, hal. 1-2).

Untuk itu, terdapat sejumlah alasan mengapa program ini yang berjalan di Nagari Batipuah Baruah perlu dibahas, khususnya terdapat bantuan modal usaha. Pertama masalah mengenai kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan alasan tersebut, permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji agar solusi penanggulangannya sesegera mungkin dapat ditemukan, khusus yang ada di Nagari Batipuah Baruah. Alasan kedua mengapa program ini dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan kemiskinan setelah program-program pemerintah sebelumnya dianggap kurang mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal di Indonesia, termasuk di Nagari Batipuah Baruah. Disamping itu terdapat sisi menarik dari program ini di Nagari Batipuah Baruah untuk diketahui apakah berjalan secara maksimal serta tujuan dan sasaran program ini apakah sudah tepat.

Berikut dana BLM yang dikelola PNPM Nagari Batipuah Baruah :

**Tabel 1. 1**  
**Dana BLM yang Dikelola PNPM Nagari Batipuah Baruah**

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2007	1.000.000.000
2	2008	2.650.000.000
3	2009	900.000.000
4	2010	1.500.000.000
5	2011	667.441.000
6	2012	1.022.361.000
7	2013	3.000.000.000
8	2014	2.663.700.000
<b>Total</b>		<b>13.403.502.000</b>

*Sumber: PNPM Batipuh*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diturunkan dari Pemerintah kepada masyarakat di Nagari Batipuah Baruah pada tahun 2007 berjumlah sebanyak Rp 1.000.000.000,-, tahun 2008 berjumlah Rp 2.650.000.000,-, tahun 2009 berjumlah sebanyak Rp 900.000.000,-, tahun 2010 berjumlah Rp 1.500.000.000,-, tahun 2011 berjumlah Rp 667.441.000,-, tahun 2012 berjumlah Rp 1.022.361.000,-, tahun 2013 berjumlah Rp 3.000.000.000,-, dan pada tahun 2014 berjumlah Rp 2.663.700.000,-. Namun pada tahun 2015 hingga saat ini, dana PNPM tidak lagi bersumber dari pemerintah pusat. Melainkan dana PNPM dikelola secara mandiri dengan melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Penyaluran dana BLM dan pemanfaatannya dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan dan jenis bantuannya. Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan dana BLM maka satuan kerja PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan rekomendasi dari konsultan pendamping maupun pemerintah daerah setempat, dan memungkinkan untuk membatalkan sebagian atau seluruh penyaluran dana BLM.

Salah satu program PNPM adalah kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dibawah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di Nagari Batipuah Baruah. Kelompok SPP ini terdiri dari masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan para perempuan khususnya para Ibu rumah tangga sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan (Lailatussaripah, 2019: 3)

Dana program SPP berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM merupakan dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan SPP perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Adapun bentuk dari kegiatan SPP ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai modal usaha atau tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan (Lailatussaripah, 2019: 4)

Berikut ini adalah data jumlah kemiskinan tingkat Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Batipuah Baruah:



**Tabel 1. 2**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2017	361.037	19.270	5.56%
2018	369.833	18.480	5.32%
2019	379.041	16.200	4.66%

*Sumber : BPS Tanah Datar*

**Tabel 1. 3**  
**Angka Kemiskinan Kecamatan Batipuah**

<b>Nama Nagari</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tanjung Barulak	552	545	539
Bungo Tanjung	274	262	253
Pitalah	295	286	271
Batipuah Baruah	875	867	859
Gunung Rajo	370	364	352
Batipuah Ateh	625	618	603
Sabu	352	347	330
Andaleh	387	375	368
Jumlah Penduduk Miskin	3.730	3.664	3.575
Jumlah Penduduk	9.550	9.554	9.556
Persentase	39,06%	38,35%	37,41%

*Sumber: Profil Nagari Batipuah*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 19.270 jiwa, tahun 2018 berjumlah sebanyak 18.480 jiwa dan untuk tahun 2019 berjumlah sebanyak 16.200 jiwa. Namun kenyataannya data kemiskinan di Nagari batipuah Baruah tertinggi jika dibandingkan dengan data kemiskinan dengan nagari-nagari yang berada di Kecamatan Batipuh tersebut.

**Tabel 1.4**  
**Persentase Angka Kemiskinan Nagari Batipuah Baruah**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2017	9,2%
2018	8,8%
2019	8,9%

Dari tabel diatas terjadinya penurunan angka kemiskinan pada Nagari Batipuah Baruah yang dilihat dari jumlah penduduk miskin terbanyak di tingkat Kecamatan Batipuh, dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Datar jauh lebih banyak perhitungan terhadap persentasenya. Dan perbandingan di Kabupaten Tanah Datar kemiskinan pada tahun 2019 sebanyak 4,66% dan di Nagari Batipuah Baruah sudah turun pun masih 8,9%.

Dari tabel dapat dilihat bahwa kemiskinan di Nagari batipuah Baruah naik turun pada tahun 2017-2019. Menurut Aidhil & Ubaidullah (2019) hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara penduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan. Dari tabel diatas pada tahun 2017, 2018, dan 2019 bertolak belakang dengan teori, yang mana pada tahun tersebut jika angka kemiskinan turun persentase angka kemiskinan juga menurun dan begitupun sebaliknya, jika angka kemiskinan meningkat persentase angka kemiskinana juga meningkat.

Penurunan kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Akan tetapi, dari data di atas dapat dilihat angka kemiskinan Nagari Batipuah Baruah masih tinggi. (Wawancara dengan Pj Wali Nagari Batipuah Baruah)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

## **(PNPM) Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti yaitu:

1. Dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Dengan adanya dana PNPM yang diturunkan Pemerintah, masyarakat mendapat kemudahan dalam menjalankan usahanya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Seberapa besar dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu: Untuk menganalisis dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

#### **1. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi:

- a. Bagi Nagari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan Nagari tersebut terutama dalam pemilihan dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

b. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta informasi dan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut masalah peran PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 3) Sebagai penerapan bagi peneliti terhadap ilmu yang sudah dipelajari dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

**G. Defenisi Operasional**

Dampak secara sederhana merupakan sebagai akibat atau pengaruh ketika akan mengambil suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya (Irwan, 2015, hal. 35). Dampak yang penulis maksud merupakan sebuah efek atau perlakuan dari setiap tindakan yang kita ambil.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas),

meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri perdesaan, hal. 2), PNPM yang penulis maksud adalah suatu program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dalam dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang terkandung ke dalam rasa kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang meningkat bagi setiap masyarakat dalam hal mengadakan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat (Dura, 2016, hal. 29). Kesejahteraan masyarakat yang penulis maksud adalah suatu keadaan bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani, rohani maupun sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. PNPM**

###### **a. Pengertian PNPM**

PNPM merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Namun, fakta di lapangan banyak masyarakat yang kerap dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri itu. Seperti PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Adapun jenis-jenis PNPM yang disebutkan di atas memang program yang mendukung serta beranung di bawah koordinasi PNPM mandiri.

PNPM mandiri sendiri digagas dan diluncurkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun peluncuran program ini berlangsung di kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April 2007 silam. Dalam pelaksanaan, program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program penanggulangan kemiskinan pada era pemerintahan sebelumnya. Penggasan program ini juga menjadikan sebagai koordinasi dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai lembaga pemerintahan yang ada pada saat itu, program yang dimaksud adalah yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya (Z, 2018, hal. 58).

Lahirnya PNPM Mandiri ini tidak secara spontan. Sesaat setelah Presiden SBY mendapatkan laporan dari berbagai pihak, mengirimkan utusan ke berbagai daerah di Indonesia, hingga wawancara langsung dengan pelaku program ini, dampaknya lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk mempelajari bagaimana cara pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Untuk itu,

pada awal tahun 2006 gagasan PNPM ini sudah menjadi wacana di Istana Negara. Pada Agustus 2006, Presiden SBY memutuskan jika pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Dan pada saat itu lahirlah kebijakan tentang PNPM ini.

Sebelum program lain bergabung PNPM Mandiri memiliki dua program yang menjadi pilar utama. Kedua program yang dimaksud adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dan pada tahun berikutnya mulai bergabung ke dalam PNPM Mandiri seperti P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW, dan Pariwisata.

Perlu kita ketahui, sebelum program ini diluncurkan pada tahun 2007 sudah banyak program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan konsep yang serupa dengan PNPM Mandiri sebagai bentuk pendekatan operasionalnya ditengah-tengah masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya, dikenal dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini mulai diluncurkan pada tahun 1993/1994 yang merupakan awal Repelita VI. Program IDT ini sebagai manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha seperti dana bergulir yang diberikan kepada lebih dari 20.000 desa tertinggal sebesar Rp20.000.000,- setiap tahunnya. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan itu, pemerintahan juga memberikan sejumlah bantuan teknis pendampingan kepada masyarakat desa guna pemanfaatan dana bergulir ini.

Setelah program IDT yang tak terlepas dari keberhasilan dan kegagalannya, lahir pula program selanjutnya. Program tersebut yakni PPK yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri yang digulirkan pada tahun 1998, Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1999. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Departemen Kealutan dan Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial. Adapun program-program tersebut dijalankan secara mandiri sesuai dengan kebijakan 60 Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral (Z, 2018: 58-60).

Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia pun mengumumkan PNPM Mandiri terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program yang dijalankan untuk mempercepat penanggulangan angka kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatannya dilakukan sebagai bentuk pengembangan dari PPK yang dinilai berhasil. Adapun keberhasilan PPK tersebut adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

- 1) PNPM Mandiri merupakan sebuah program berskala nasional yang berupa wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan penanggulangan angka kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem. Selain itu, mekanisme dan prosedur PNPM Mandiri ini serta penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan dalam mendorong prakarsa serta inovasi masyarakat sebagai upaya penanggulangan angka kemiskinan yang berkelanjutan.



2) Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan sebuah upaya dalam menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan ada. Persoalan yang dimaksud di sini meliputi upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat tersebut diperlukan keterlibatan yang besar, mulai dari pemerintah daerah hingga berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan serta menjamin keberlanjutan terkait dengan hasil dari peningkatan kapasitas masyarakat (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri perdesaan, hal. 2).

#### **b. Tujuan PNPM**

##### **1) Tujuan Umum**

Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menyediakan kesempatan kerja bagi yang diperuntukkan masyarakat miskin.

##### **2) Tujuan Khusus**

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk kelompok masyarakat miskin.
- b) Mengembangkan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah guna mengurangi angka kemiskinan.
- c) Menumbuhkan sinergi antara *stakeholder* untuk dalam mengurangi angka kemiskinan.
- d) Memperkuat sosial kapital dan inovasi untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat (Bappenas, 2013, hal. 27).

#### **c. Dasar Hukum PNPM Mandiri**

Dasar hukum PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, Pancasila serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri perdesaan, hal. 2) Adapun peraturan perundang-undangannya terkait dengan sistem pemerintahan, sistem perencanaan, keuangan negara, serta kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1) Sistem pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
- c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2) Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-1025.
- c) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

- f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

### 3) Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597).
- f) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan barang/jasa Pemerintah.

- g) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan usulan serta kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

**d. Prinsip PNPM Mandiri**

PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Program ini bertumpu pada pembangunan manusia.  
Pelaksanaan program ini senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia secara seutuhnya.
- 2) Otomoni  
Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 3) Desentralisasi  
Adapun kewenangan program ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin  
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.
- 5) Partisipasi  
Masyarakat terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan yang dilakukan secara gotong royong.

6) Kesetaraan dan keadilan gender

Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya sebagai tahap pembangunan dalam menikmati secara adil untuk manfaat kegiatan pembangunan.

7) Demokratis

Setiap pengambilan keputusan pembangunan, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu.

8) Transparansi dan akuntabel

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap seluruh informasi serta proses pengambilan keputusan. Sehingga pengelolaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

9) Prioritas

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan angka kemiskinan. Ini dilakukan secara optimal dengan berbagai sumberdaya yang terbatas.

10) Kolaborasi

Seluruh pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan angka kemiskinan ini, didorong untuk bekerjasama dan bersinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan angka kemiskinan.

11) Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan wajib mempertimbangkan kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya dilakukan pada saat ini, namun juga dapat dimasa mendatang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

## 12) Sederhana

Seluruh aturan, mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan program ini harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, serta mudah dikelola. Selain itu pelaksanaannya juga harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri (Depdagri, 2008, hal. 60).

### **e. Program dan Ruang Lingkup Kerja PNPM Mandiri**

Program serta ruang lingkup PNPM Mandiri sebagai proses pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

#### 1) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan dalam membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat. Hal ini terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Guna mendukung rangkaian kegiatan tersebut dibutuhkan dana pendukung untuk kegiatan pembelajaran masyarakat, dan operasional pendampingan masyarakat, serta fasilitator pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Dalam hal ini fasilitator memiliki peran terutama pada saat awal pemberdayaan. Kemudian relawan masyarakat memiliki peran sebagai penggerak masyarakat di wilayah masing-masing.

#### 2) Bantuan Langsung Masyarakat

Jenis bantuan ini merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

### 3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan bersinergi serta yang positif bagi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dalam kehidupan yang layak. Contoh kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya dan kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif.

### 4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kinerja pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan, seperti halnya penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Untuk ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri biasanya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan angka kemiskinan yang diusulkan serta disepakati oleh masyarakat. Bentuk kegiatan tersebut meliputi:

- a) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Adapun perhatian yang lebih besar diberikan kepada kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
- c) Kegiatan yang terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target MDGs.

- d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

**f. Jenis-jenis Kegiatan PNPM Mandiri**

Jenis-jenis kegiatan PNPM Mandiri adalah (Depdagri, 2008):

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin.
- 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produk berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

**g. Mekanisme Penyaluran Dana PNPM**

Penyaluran dana (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan proses penyaluran dari rekening kolektif Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa.

Mekanisme penyaluran dana tersebut sebagai berikut adalah:

- 1) Dana yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Departemen Keuangan.



- 2) Dana yang disalurkan berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD serta diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
- 3) Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu kepada masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN.
- 4) Adapun besaran dana dari APBD disalurkan ke masyarakat harus utuh dan tidak termasuk pajak, restribusi, atau biaya lainnya (Putri, 2020: 28).

#### **h. Indikator PNPM Perdesaan**

Indikator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bisa dilihat dari efektifitas program tersebut. Hal itu bisa diketahui dengan melakukan perbandingan antara tujuan program dengan output program, pendapat anggota dalam program juga dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan efektifitas program tersebut. Adapun efektifitas ini dapat menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam mengukur efektifitas sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan program

Berdasarkan cara pengukuran efektifitas tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

- a) Ketepatan sasaran program
- b) Sosialisasi program
- c) Tujuan program
- d) Pemantauan program

Dari keempat indikator tersebut dapat diketahui efektif tidaknya Program PNPM yang akan diteliti oleh penulis.

**i. PNPM di Nagari Batipuah Baruah**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Nagari Batipuah Baruah ini melaksanakan program PNPM untuk mengurangi angka kemiskinan adalah program dana bergulir. Program dana bergulir PNPM ini pada hakikatnya melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyaluran seluruh dana bergulir di tingkat nagari.
- 2) Kelompok peminjam sebagai pengelola dan sekaligus penyaluran dana bergulir kepada anggotanya di tingkat nagari.
- 3) Tim pengelola kegiatan di nagari berperan sebagai fasilitator antara kelompok peminjam dan UPK di tingkat nagari. Adapun satu kelompok peminjam terdiri dari 25 orang.

Terkait mekanisme pelaksanaan dana bergulir ini diawali oleh kelompok peminjam sebagai pemanfaat dana bergulir. Terlebih dahulu kelompok peminjam harus mengajukan proposal pinjaman kepada penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Proposal tersebut memaparkan tentang data anggota kelompok. Untuk besaran jumlah pinjaman paling sedikit Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,-.

Sistem yang digunakan adalah pengurus kelompok mengajukan proposal peminjaman, selanjutnya pihak UPK akan memberikan pinjaman tersebut kepada pengurus kelompok apabila memenuhi syarat. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 11,5 bulan.

Kemudian jika pengembalian pinjaman melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan sanksi khusus, hanya dikurangi dari dana awal pinjaman. Di dalam PNPM Nagari Batipuah Baruah menjelaskan

sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok yang berupa sanksi hukum. Jika anggota kelompok tidak melunasi setoran pada jangka waktu yang sudah ditentukan, maka anggota kelompok tersebut tidak berhak lagi mendapatkan pembiayaan sampai setoran beserta keuntungannya dilunasi. (Wawancara dengan Ketua PNPM Nagari Batipuah Baruah)

## **2. Kemiskinan**

### **a. Pengertian Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan dapat dinilai berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada dasarnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri defenisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Pasalnya kondisi yang disebut miskin itu bersifat relatif bagi setiap negara. Misalnya, terkait dengan kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, hingga kondisi sosial. Setiap defenisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok. Sehingga hal itu dapat diukur dalam ketidakmampuan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. (Elvira Handayani Jacobus, 2018, hal. 4)

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Bappenas (2010) kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak

mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

#### **b. Penyebab Kemiskinan**

Dilihat dari penyebabnya kemiskinan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

##### 1) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang dicapai, memiliki sifat bermalas-malasan dan cara berfikir masyarakat yang kurang rasional juga dapat menyebabkan kemiskinan.

##### 2) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan, sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Adapun kondisi alam yang kurang menguntungkan seperti tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non mineral, serta minimnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan (Gampito, 2016, hal. 40-41).

#### **c. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan**

Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam usaha penanggulangan kemiskinan di Tanah Air. Usaha tersebut diperlukan strategi serta intervensi yang tepat, dalam arti *cost effectiveness*-nya tinggi. Terdapat tiga pilar utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Tiga pilar utama tersebut yakni:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan
- 2) Pemerintahan yang baik, serta
- 3) Pembangunan sosial

Selain itu, guna mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan (Tambunan, 2006), Prayitno dan Santosa (1996). Adapun langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tersebut diperlukan pertimbangan, antara lain:

- a) Dalam penanggulangan kemiskinan akan berjalan baik dan efektif apabila memiliki suasana yang tenang dan stabil. Kestabilan tersebut mutlak diperlukan guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan program penanggulangan angka kemiskinan. Karena pada dasarnya, upaya penanggulangan angkakemiskinan merupakan upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.
- b) Program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.
- c) Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik, memungkinkan untuk pendistribusian kesejahteraan antar warga masyarakat yang dapat dilakukan secara merata.
- d) Program penanggulangan angka kemiskinan merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat berjalan secara terus-menerus dan berjalan secara mandiri. Program penanggulangan angka kemiskinan ini harus berlandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Program ini juga dilakukan untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari suatu kegiatan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, paling tidak harus memiliki perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu:
  - (1) Akses terhadap sumber daya.

- (2) Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien.
  - (3) Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual kembali untuk mendapatkan nilai tambah.
  - (4) Akses terhadap sumber pembiayaan.
- e) Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan pemerintah serendah mungkin. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri (Murdiansyah, 2014, hal. 77-78).

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” dari bahasa sansekerta “Catera” berarti payung. Namun kesejahteraan yang dimaksud yakni kesejahteraan orang atau manusia yang memiliki kehidupan yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran. Dengan begitu taraf kehidupan seseorang akan aman dan tentram, baik dari segi lahir maupun batin (Fahrudin, 2014, hal. 8).

Selain itu kesejahteraan menurut Nasikum (1993) dapat dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia. Hal ini juga dapat kita lihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Indikator ini sendiri nantinya digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang terciptanya dari indikator tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rosni, 2017, hal. 57).

Sementara itu menurut Rambe, kesejahteraan merupakan sebuah tata kelola kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual. Hal ini diikuti dengan rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat secara lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang baik bagi diri sendiri, rumah tangga dan masyarakat. Hal ini tidak luput dari asas menjunjung tinggi hak-hak asasi (Ihsannudin, 2013, hal. 140).

Kemudian kesejahteraan menurut Fahrudin adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak guna menunjang kualitas hidupnya. Sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakuta, atau kekhawatiran yang menjadikan kehidupannya aman, tentram, baik secara lahir maupun bathin. (Rosni, 2017, hal. 57)

Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran dari hasil pembangunan masyarakat itu sendiri dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, meliputi:

- 1) Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

2) Tingkat Kebutuhan

Peningkatan tingkatan kehidupan, tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih baik.

3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Tutik, 2008, hal. 111-112).

**b. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Guna mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat kita ukur dari ruang lingkup terkecil, yakni tingkat keluarga. Kesejahteraan keluarga menurut (Siti Kurnia Widiastuti, 2015, hal. 41-42) memiliki beberapa tahapan antara lain:

1) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, pakain, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis, dan keluarga berencana.

3) Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga sudah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologi. Namun keluarga yang dimaksud ini belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangannya (*Development Needs*). Kebutuhan pengembangan yang dimaksud meliputi kebutuhan agama, menabung, kebutuhan untuk berinteraksi dalam keluarga,



kebutuhan untuk ikut melaksanakan kegiatan dalam bermasyarakat hingga kebutuhan untuk memperoleh suatu informasi yang bersumber dari berbagai media.

- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti halnya teratur dalam memberikan suatu sumbangan berupa sumbangan material maupun keuangan guna kepentingan hidup secara sosial kemasyarakatan dan berperan secara aktif dengan menjadi pengurus dalam sebuah kelembagaan masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan, lembaga kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
- 5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, bersifat sosial psikologis maupun kebutuhan yang bersifat pengembangan dan suatu keluarga yang dianggap sudah dapat memberikan sumbangan secara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

**c. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan**

Dalam bentuk yang lebih spesifik, nilai pendapatan per kapita menjadi faktor lain sebagai tingkat kesejahteraan karena hal ini merupakan sebagai indeks untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan. Adapun jurang tingkat kesejahteraan pernah dikritik karena perbandingannya mengabaikan dalam perbedaan-perbedaan seperti yang terjadi di berbagai negara.

Faktor-faktor yang dimaksud yakni:

- 1) Komposisi Umur Penduduk

Di negara berkembang, jumlah penduduk yang berusia di bawah umur dan penduduk yang berusia muda, lebih tinggi jika

dibandingkan dengan penduduk di negara maju. Maka perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua golongan penduduk di kedua jenis negara tersebut tidaklah seburuk yang digambarkan jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita mereka.

#### 2) Distribusi Pendapatan Masyarakat

Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan ialah faktor penting yang dapat menentukan keadaan kesejahteraan hidup suatu masyarakat. Pada dasarnya, faktor ini tidak dapat diperhatikan jika membandingkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dengan perubahan dari masa ke masa. Hal ini terjadi jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita.

#### 3) Pola Pengeluaran Masyarakat

Adapun pola pengeluaran masyarakat di berbagai negara, terkadang sangat berbeda. Perbedaan ini menyebabkan dua negara yang memiliki pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati kesejahteraan dengan tingkat yang sama.

#### 4) Komposisi Pendapatan Nasional

Demikian pula dengan dua masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang sama, tingkat kesejahtraannya juga akan sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya berlainan. Masyarakat akan akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan per kapita apabila proporsi pendapatan nasional yang merupakan pengeluaran untuk pertahanan. Selain itu juga untuk pembentukan modal yang lebih tinggi dari pada negara lain yang memiliki persamaan pendapatan per kapitanya.

#### 5) Perbedaan Masa Lapang

Tidak sempurnanya pendapatan per kapita sebagai alat pembanding kesejahteraan masyarakat, bersumber pula dari

perbedaan masa lapang yang dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini, pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan dikritik dengan alasan jika dua masyarakat yang memiliki pendapatan rata-rata sama besarnya, tidak bisa dianggap memiliki kesejahteraan yang sama bila masa bekerja untuk memperoleh pendapatan itu berbeda.

6) Keadaan Pengangguran

Pembangunan ekonomi yang digambarkan berdasarkan kepada lajunya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita dianggap kurang sempurna. Alasannya, cara tersebut tidak dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan dalam masalah pengangguran yang tengah dihadapi. Disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja (Sukirno, 2007, hal. 58-60).

**d. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Setiap manusia yang hidup di dunia ini mendambakan sebuah kesejahteraan. Hal itu berlaku bagi manusia yang tinggal di kota maupun di desa. Kesejahteraan itu sendiri menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia yang makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia yaitu bidang ekonomi, sosila, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu rumah tangga di suatu wilayah, Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran, antara lain adalah:

1) Tingkat Pendapatan Keluarga

Pendapatan merupakan sebuah penghasilan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas penjualan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penghasilan. Dengan

adanya aktivitas tersebut, pendapatan atau penghasilan secara tidak langsung akan meningkatkan standar kehidupan bagi pelaku industri rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya pendapatan tersebut, juga akan merubah pola konsumsi. Semakin tinggi jumlah pendapatan, maka akan semakin tinggi juga jumlah konsumsi.

Sejatinya, pendapatan tersebut merupakan hasil dari seluruh penerimaan, baik berupa uang maupun dalam bentuk barang. Ini berasal dari pihak konsumen maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar nilai uang yang berlaku saat aktivitas jual beli berlangsung.

Selain diukur dengan jumlah yang didapat, standar kehidupan yang berlaku dalam rumah tangga juga dapat diukur melalui pendapatan yang dilihat melalui kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kebutuhan yang dimaksud meliputi sandang, papan dan pangan.

Kebutuhan sandang dapat diukur seberapa sanggup dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan berupa pakaian dan kebutuhan terkait. Untuk kebutuhan papan, bisa diukur dengan tahapan seberapa sanggup rumah tangga mampu dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal (alat-alat rumah tangga). Sedangkan kebutuhan pangan, bisa diukur dari segi kebutuhan pokok. Seperti makanan layak termasuk kebutuhan karbohidrat, vitamin dan protein.

## 2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah aktivitas guna meningkatkan pola pikir dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi. Dalam menganalisa indikator pendidikan, dibutuhkan 3 hal yang meliputi tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan dan penggunaan layanan pendidikan.

Secara umum, pendidikan berfungsi untuk membantu secara sadar terkait dengan perkembangan jasmani dan rohani anak didik dan pendidikan sebuah alat perkembangan pribadi masyarakat sebagai pembentuk keluarga.

### 3) Tingkat Kesehatan

Mengacu pada UU No.36 tahun 2009, kesehatan berarti keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam menganalisa kesehatan dan standar hidup rumah tangga, dibutuhkan empat jenis indikator yakni status gizi, status penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan dan penggunaan layanan kesehatan (Rukmana, 2019, hal. 28-30).

#### e. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yaitu:

- 1) Guna mencapai kehidupan yang sejahtera yang meliputi tercapainya standar kehidupan pokok seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, kebutuhan pangan, kesehatan, serta relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Guna mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya. Misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang lebih memuaskan. (Adi, 2012, hal. 10).

#### f. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain:

1) Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu dan keluarga agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional serta sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar.

3) Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup ke dalam kegiatan yang membantu dalam mencapai sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2012: 12).

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Penulis melakukan penelaah terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Banta Umar, 2014 dengan judul skripsi Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Ekonomi Perdesaan Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya). Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari skripsi tersebut adalah PNPM Mandiri

Perdesaan berpengaruh signifikan terhadap ekonomi perdesaan di Kecamatan Kuala Pesisir khususnya sekabupaten Nagan Raya sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya melalui usaha-usaha yang dijalankan dengan adanya bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini membuktikan PNPM Mandiri sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan peneliti Banta Umar dengan penulis yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan terhadap perekonomian perdesaan di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Kedua, mengetahui bagaimana pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di sektor ekonomi pada masyarakat di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan ketiga, untuk mengetahui bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan terhadap cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Kuala Pesisir di bidang ekonomi melalui PNPM. Sedangkan penulis memfokuskan pada dampak dana PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Ari Pratama, 2018 dengan judul skripsi Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam). Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari skripsi tersebut adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, itu dibuktikan dengan adanya pengurangan angka kemiskinan peserta PNPM sebesar 75%. Jumlah penduduk miskin sebelum program (2009) adalah 4,55% dan turun menjadi 1,14% di tahun 2016.

Pemberdayaan masyarakat ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberian modal usaha berupa simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan peserta SPP di UPK PNPM Mandiri, bahwa setiap penambahan Rp1, maka pendapatan bertambah sebesar Rp0,240.

Perbedaan peneliti Ari Pratama dengan penulis yaitu melihat pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap tingkat kemiskinan sedangkan penulis meneliti tentang dampak dana PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah. Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

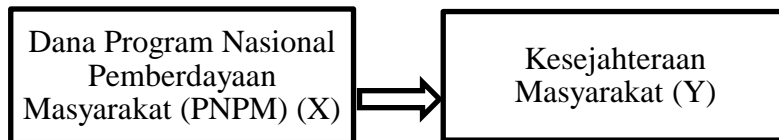
3. Annisa Nayyirotur Riswah, 2019 dengan judul skripsi Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari skripsi tersebut adalah Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, artinya jika variabel DAPM Khasanah ditingkatkan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perbedaan peneliti Annisa Nayyirotur Riswah dengan penulis yaitu melihat pelaksanaan Program DAPM Khasanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam penanggulangan kemiskinan sedangkan penulis meneliti tentang dampak dana PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah. Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

### C. Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan bermakna, maka diperlukan suatu kerangka untuk pemikiran yang lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 2.1**





**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2015: 144).

- $H_a$ : Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah.
- $H_0$ : Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kuantitatif.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Nagari Batipuah Baruah. Waktu penelitian ini mulai bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

**Tabel 3. 1  
Jadwal Penelitian**

Aktivitas Kegiatan	2021											2022	
	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u s t	S e p t	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b
Penyusunan proposal													
Bimbingan proposal													
Seminar proposal													
Revisi Proposal													
Penelitian													
Bimbingan Skripsi													
Munaqasah													

*Sumber: Data Diolah, 2021*

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Nagari Batipuah Baruah yang terkait dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berjumlah 150 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat yang terkait dengan PNPM Nagari Batipuah Baruah. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang homogen. Agar sampel yang didapat terdistribusi, maka populasi juga harus dibuat acak tidak urut. Menurut (Arikunto, 2002: 112) apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10 - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Maka dari itu penulis mengambil 20% sampel dari seluruh populasi yang ada. Untuk menentukan sampel maka digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = N \times 20\%$$

Dimana:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: nilai kritis atau ketelitian yang diinginkan yaitu 20%

$$n = 150 \times 20\%$$

$$n = 30 \text{ Responden}$$

## D. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan kuesioner yaitu dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab, guna mendapatkan data dari keanggotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

### 1. Uji Validitas

Suatu instrument dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti dengan tepat. Validitas adalah alat ukur menunjukkan sejauh

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Disini penulis menggunakan kuesioner penelitian terdahulu yang telah teruji dan bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner penelitian Annisa Nayyirotur Riswah tahun 2019 jurusan Ekonomi Islam dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”.

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 2**  
**Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

Variabel	Indikator
Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan sasaran program</li> <li>2. Sosialisasi program</li> <li>3. Tujuan program</li> <li>4. Pemantauan</li> </ol>
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan pendapatan</li> <li>2. Pendidikan yang terjangkau</li> <li>3. Kualitas Kesehatan (Riswah, 2019: 67)</li> </ol>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dalam bentuk kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk memberikan jawaban. Dari sebanyak 150 orang keanggotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) penulis hanya menyebar kuesioner sebanyak 30 orang responden, dimana dalam hal ini akan diberikan kepada anggota PNPM.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan di lapangan dan lain-lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data tersebut bersifat tetap, dapat dipercaya. Untuk mengelola data dibantu dengan aplikasi komputer *microsoft excel* 2010. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi, mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah suatu variabel normal atau tidak, data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian terhadap residul terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan Jarque-Bera Test.

Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut:

Hipotesis

Bila Probabilitas Jarque-Bera  $>0,05$   $\longrightarrow$  signifikan

Bila Probabilitas Jarque-Bera  $<0,05$   $\longrightarrow$  tidak signifikan

#### b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi (Kadir, 2015:147). Uji Multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Apabila terjadi korelasi antar variabel bebas, maka terdapat problem multikolineritas pada model

regresi tersebut (Hadi, 2002: 207). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas adalah:

- 1) Melihat nilai tolerance: jika nilai tolerance lebih besar dari  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari  $< 0,10$  maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Melihat nilai VIF (variance inflation factor) adalah:

- a) Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
- b) Jika nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi (Umar, 2014).

## 2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah suatu analisis untuk mengukur pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya.

Menggunakan persamaan regresi dengan rumus:

$$Y = a + bX$$

Dimana: Y = kesejahteraan masyarakat

X = dana PNPM

a = konstanta

b = kemiringan/koeffisien

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dimana :

- 1) Apabila nilai probability t hitung lebih  $<$  dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dalam penelitian ini yang

dimaksud adalah dana pnpm berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

- 2) Apabila nilai probability t hitung lebih > dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah dana pnpm tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Nagari Batipuah Baruah**

###### **a. Sejarah Nagari Batipuah Baruah**

Sejarah Nagari Batipuah Baruah bermula dari orang-orang *nan Ampek* jenis yang bersamaan dengan penerimaan mereka menurut *warisan di jawek, pusako batulang*. Adapun pertemuan tersebut dilakukan di Balairong Adat Balai Gadang Batipuah Baruah, pada hari kamis tanggal 06 Desember 1945.

Nagari Batipuah Baruah terdiri dari 4 kampung yaitu:

- 1) Kampung III Suku
- 2) Kampung Nan IV Suku
- 3) Kampung Nan V Suku
- 4) Kampung Nan VII Suku

Seperti diketahui dan diselidiki, bahwa Ninik-ninik Nagari batipuah Baruah yang berasal dari Pariangan Padang Panjang berjumlah 14 (Empat Belas) orang. Ke empat belas orang ninik kemudian turun ke Batipuh dan menjadi Ibu Bapo. Adapun Dt Sinaro Nan Hitam menjadi *Pucuk Bulek Urek Tunggang* bagi ninik yang 14 (Empat Belas). Atas keputusan tersebut kemudian ninik urang nan 14 (Empat Belas) di bagi menjadi dua:

- 1) Tujuh orang ke Bukit Nagari Batipuah Ateh yang sekarang.
- 2) Tujuh orang ke bawah Nagari Batipuah Baruah yang sekarang.

Keputusan rapat/musyawah urang nan 14 (Empat Belas) juga diketahui oleh Dt. Sinaro Nan Hitam.

Adapun asal usul nama Nagari Batipuah Baruah berasal dari sebatang kayu yang beripuh tumbuhnya dibawah batang kayu beringin besar yang berada di dekat Balai Gadang.



## **b. Visi Misi Nagari Batipuah Baruah**

Dalam menjalankan roda pemerintahan Nagari Batipuah Baruah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah ditetapkan Visi dan Misi Nagari Batipuah Baruah yaitu:

### 1) Visi dan Misi Nagari Batipuah Baruah

*“Terwujudnya masyarakat Nagari Batipuah Baruah yang sejahtera dan Bernuansa Islami.”*

Dari visi tersebut dapat dijabarkan beberapa hal penting yaitu:

- a) Masyarakat Nagari Batipuah Baruah adalah masyarakat yang tinggal atau berdomisili di 11 (sebelas) jorong di dalam wilayah Nagari Batipuah Baruah.
  - b) Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan pemerataan hasil pembangunan serta mendapatkan pelayanan sosial yang baik.
  - c) Nuansa Islami adalah setiap aspek kehidupan (pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) yang dilandasi dengan norma-norma islami.
- ### 2) Misi Nagari batipuah Baruah

Untuk mewujudkan visi nagari tersebut di atas, telah ditetapkan 5 (lima) Misi Nagari Batipuah Baruah:

- a) Mewujudkan Nagari Batipuah Baruah sebagai nagari yang berbasis pendidikan Islami.
- b) Mewujudkan masyarakat yang sehat.
- c) Mewujudkan ekonomi yang mandiri.
- d) Mewujudkan tatanan sosial budaya yang berbasis Islami sejalan dengan filosofi Adat Basadi Syara', Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK)
- e) Mewujudkan tata pemerintahan nagari yang bersih, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab.

### c. Kondisi Geografis

Nagari Batipuah Baruah berada di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Batipuah Baruah sekitar 51,21 kilometer persegi atau 35,50 persen dari luas wilayah Kecamatan Batipuh. Nagari Batipuah Baruah berjarak 1 kilometer dari ibukota Kecamatan Batipuh dan sekitar 33 kilometer dari ibukota Kabupaten yakni Batusangkar.

Batas-batas Nagari Batipuah Baruah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Nagari Gunung Rajo hingga Batubarajo, Nagari Pitalah hingga Batang Sinaan.
- 2) Sebelah Barat : Nagari Jaho hingga Batu Duo, Nagari Tambangan hingga Guguk Sagan.
- 3) Sebelah Utara : Nagari Batipuh Atas hingga Ganting, Nagari Paninjauan hingga Kubu Keheng, Nagari Andaleh hingga Kubu Keheng.
- 4) Sebelah Selatan : Nagari Padang Laweh hingga Guguk Samain, Nagari Induring hingga Batu Batambun.

Nagari Batipuah Baruah terbagi menjadi jorong yaitu:

- a) Batang gadih
- b) Batu Lipai
- c) Gunuang Bungsu
- d) Kubu Karambia
- e) Kubu Nan Ampek
- f) Kubu Nan Limo
- g) Ladang Laweh
- h) Lubuak Bauak
- i) Payo
- j) Pincuran Tujuh
- k) Subang Anak

#### d. Visi Dan Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

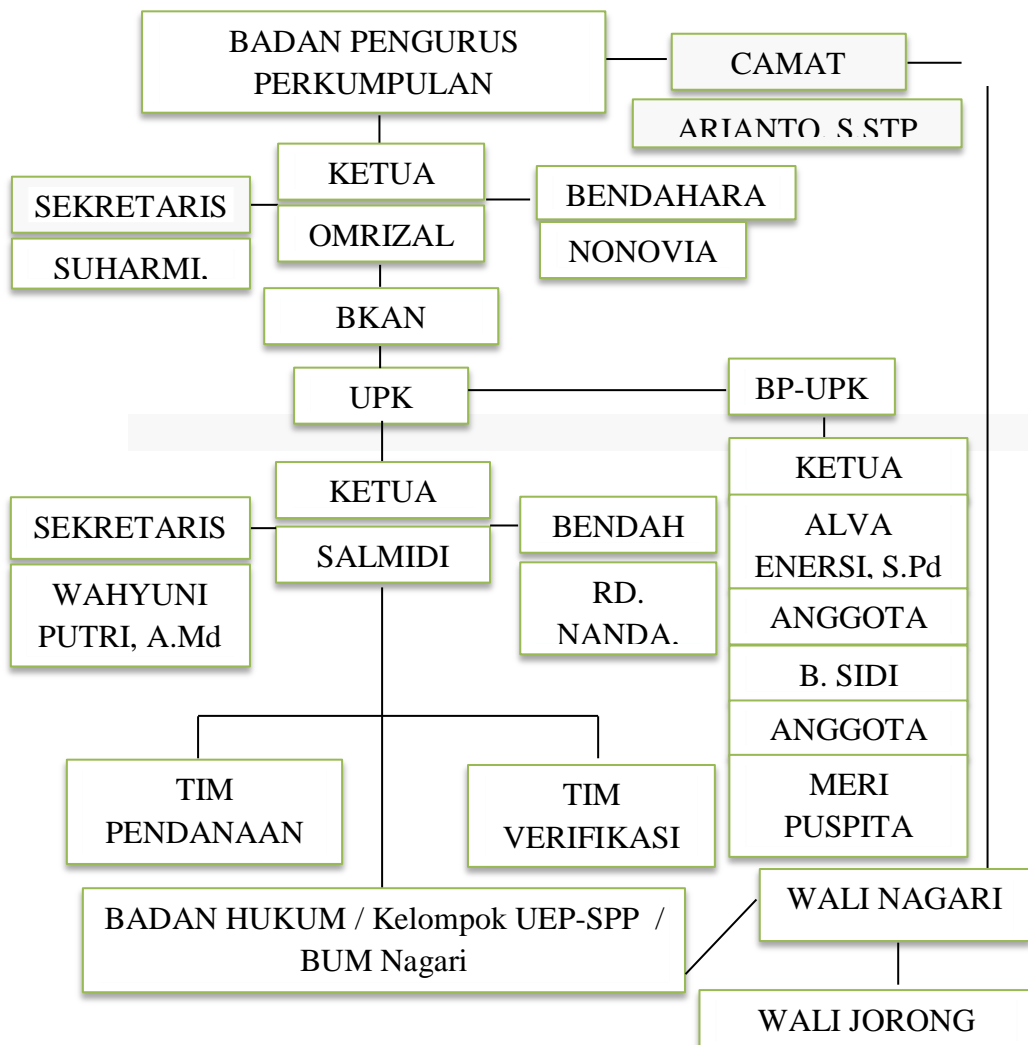
##### 1) Visi

Menjadikan UPK sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Batipuh.

##### 2) Misi

- a) Mengembangkan jaringan dengan lembaga keuangan.
- b) Membentuk dan membina kelompok simpan pinjam perempuan.
- c) Meningkatkan sumberdaya manusia pelaku. (Arsip PNPM Batipuh, Selasa, 11 Januari 2022)

#### e. Struktur Organisasi PNPM Mandiri Nagari Batipuah Baruah



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi**

**f. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus PNPM Nagari Batipuah Baruah**

**1) Tugas Pokok Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

a) Umum

“Melaksanakan amanat BKAN atau forum MAN untuk menjamin pelestarian aset kegiatan PNPM-MPd dan atau sebutan lainnya pada wilayah kerja UPK yang didasari oleh Visi, Misi dan aturan lainnya.

b) Khusus

(a) Mengelola dana bergulir sesuai dengan dasar dan aturan pokok pengelolaan dana bergulir.

(b) Menyalurkan dan mengelola dana bergulir untuk pengembangan ekonomi serta menjaga dan melestarikan aset program PNPM-MPd yang berasal dari Pemerintah maupun pihak ketiga.

**2) Ketua UPK**

a) Melaksanakan kegiatan yang telah digariskan oleh MAN serta BKAN dan bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan tersebut ekaligus melaporkan hasil pelaksanaannya.

b) Melaporkan perkembangan dan kondisi UPK kepada BKAN, BpP-UPK secara periode.

c) Mengusahakan peningkatan dan kemampuan tugas pengurus UPK yang lebih profesional.

d) Melakukan inovasi dan kreasi untuk pengembangan UPK.

e) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional harian.

f) Mengusulkan penambahan dan pengurangan pengurus UPK kepada BKAN.

g) Memberi masukan dalam perencanaan kegiatan tahunan, kebijakan dan peraturan-peraturan, Rencana Anggaran

Pendapatan dan Biaya serta membuat laporan rutin setiap bulan kepada BKAN.

- h) Melakukan koordinasi secara rutin, evaluasi, memberi arahan dan peringatan kepada semua pengurus UPK dalam rangka peningkatan kinerja. (Salmidi, Ketua UPK, Wawancara langsung, Selasa, 11 Januari 2022)

### **3) Sekretaris**

- a) Membuat kelengkapan administrasi.
- b) Pengarsipan/pendokumentasian secara tertib semua kelengkapan administrasi.
- c) Penanganan proses kredit dan pengendalian pinjaman, melakukan penagihan pinjaman dan pembinaan kelompok.
- d) Mencatat investaris kantor (pengelola kelengkapan dan kebutuhan kantor).
- e) Menyusun data kelompok pemanfaat.
- f) Menyusun absen harian, notulen, berita acara dan kelengkapan lainnya.
- g) Mengelola sistem informasi baik internal maupun eksternal termasuk papan informasi.
- h) Melaksanakan dan bertanggungjawab atas tugas-tugas lain yang diberikan ketua.(Wahyuni Putri, Sekretaris UPK, Wawancara langsung, Senin, 10 Januari 2022)

### **4) Bendahara**

- a) Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sekaligus bertanggungjawab membuat pembukuan dan laporan keuangan secara rutin setiap bulan.
- b) Membuat perencanaan keuangan (cash flow perguliran, cash flow pendapatan dan biaya).
- c) Menerima, mengeluarkan, menyimpan uang di bank dan bertanggungjawab memegang rekening buku bank.

- d) Melaksanakan dan bertanggungjawab atas tugas-tugas lain yang diberikan ketua. (RD Nanda, Bendahara UPK, Wawancara langsung, Senin, 10 Januari 2022)

## B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden ini biasanya digunakan untuk mengetahui keberagaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dari responden yang berkaitan dengan masalah/tujuan peneliti tersebut.

### 1. Berdasarkan Rentang Usia

Karakteristik responden berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia**

Rentang Usia	Jumlah
30-39 Tahun	4
40-49 Tahun	8
50-69 Tahun	16
>70 Tahun	2
Total	30

*Sumber : data diolah 2022*

Berdasarkan karakteristik rentang usia responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden yang berusia antara 30 – 39 tahun sebanyak 4 orang, responden yang berusia 40 – 49 tahun sebanyak 8 orang, responden 50 -69 tahun sebanyak 16 orang, dan yang berusia lebih dari 70 tahun sebanyak 2 orang. Sebagian responden yang lebih dominan adalah yang berusia 50-69 tahun.

### 2. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan	Jumlah
SD	8
SMP	6
SMA/SMK	16
Total	30

*Sumber : data diolah 2022*

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir pada tabel diatas, terlihat bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 6 orang, dan responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 16 orang.

### 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Ibu Rumah Tangga	15
Petani	7
Pedagang	8
Total	30

Berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan responden pada tabel diatas, menunjukkan bahwa responden sebagai ibu rumah tangga sebanyak 15 orang yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti online shop, usaha kue, namun penghasilan dari usaha yang dijalannya masih sedikit dikarenakan modalnya kurang. Hal tersebut memungkinkan mereka kehilangan usahanya, sehingga mereka meminjam dana untuk tambahan modal, petani sebanyak 7 orang, dan pedagang sebanyak 8 orang.

## C. Pengujian Validitas

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah uji validitas data yang disusun benar-benar mampu mengukur yang diinginkan. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa valid validitas data yang dapat mengungkap data dari variabel penelitian yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor setiap butir soal dinyatakan skor  $x$  dan skor total dinyatakan skor  $y$  dengan perolehannya. Indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya (Arikunto, 1999:65).

Pengujian validitas butir soal dengan butir soal mengkorelasikan skor total yang penyelesaiannya dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 26. Uji validitas dengan membandingkan antara  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  dengan menggunakan rumus koefisien korelasi yang dikemukakan pearson, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan dapat dinyatakan valid
- b) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka pernyataan dapat dinyatakan tidak valid

Uji validitas dilakukan mengungkapakan apakah pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner tersebut valid atau tidak, berdasarkan data yang diolah pada SPSS data yang signifikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Uji Validitas Dana PNPM**

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X1	0.522	0.349	Valid
2	X2	0.584	0.349	Valid
3	X3	0.593	0.349	Valid
4	X4	0.688	0.349	Valid

*Sumber: data olahan SPSS versi 26*



Berdasarkan dari hasil tabel yang tersaji diatas dapat dilihat dari 4 butir pernyataan validitas data dana PNPM dapat dinyatakan valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga pernyataan dapat dinyatakan valid.

Uji validitas data untuk variabel kesejahteraan masyarakat yang diperoleh menggunakan program SPSS versi 26, pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 5**  
**Uji Validitas**  
**Kesejahteraan Masyarakat**

No	Pertanyaaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Y1	0.453	0.349	Valid
2	Y2	0.879	0.349	Valid
3	Y3	0.542	0.349	Valid

*Sumber: data olahan SPSS versi 26*

Berdasarkan dari hasil tabel yang tersaji diatas dapat dilihat dari 3 butir pertanyaan variabel pendapatan dinyatakan valid. Karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga pernyataan dapat dinyatakan valid.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

###### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, maka sebelum melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini yaitu analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya.

**Tabel 4. 6**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual	
N	30

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56864460
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.078
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data olahan SPSS 26

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa variabel-variabel berdistribusi normal dimana nilai signifikan berada diatas 0,05 atau nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan telah berdistribusi normal dan dapat diolah ke tahap selanjutnya.

#### b. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4. 7**  
**Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3.965	1.591		2.492	.019		
	Dana PNP (X)	.437	.142	.502	3.069	.005	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Y)

Sumber: Data olahan SPSS 26

Dari hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan diketahui bahwa Nilai tolerance dan VIF dari variabel diatas memenuhi kriteria

dimana nilai tolerance besar dari 0,1 dan kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

**Tabel 4. 8**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 <sup>a</sup>	.494	.476	2.179

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas besar nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,703. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,494, artinya bahwa pengaruh variabel bebas (dana PNPM) terhadap variabel terikat (kesejahteraan masyarakat) adalah sebesar 49%.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel independen yang ada didalam model terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan jika tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (Priyatno, 2014). Sebelum diketahui bahwa hasil uji hipotesis diterima atau ditolak maka tentukan  $t_{tabel}$  dengan signifikan 5% (0.05) dengan uji satu arah dan  $df=n-k-1$  atau  $30-1-1 = 28$  diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,70113. Adapun hasil pengujian t pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Uji t (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta		
3.965	1.591		2.492	.019
.437	.142	.502	3.069	.005

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (y)

*Sumber : Data hasil olahan SPSS 26*

Berdasarkan tabel, maka didapatkan t tabel 1,701 dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan pengambilan keputusan, variabel dana PNPM diperoleh  $t_{hitung}$  3,069, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,069 > 1,701$ ) maka dapat dikatakan variabel dana PNPM berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Uji Regresi Linier Sederhana**

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan sistematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linier sederhana ini memiliki satu perubahan yang dihubungkan tidak bebas, dengan bentuk umum dari persamaan regresi linier adalah:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 3,965 + 0,437x$$

**Tabel 4. 2**  
**Uji Linier Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta		
3.965	1.591		2.492	.019
.437	.142	.502	3.069	.005

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (y)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) sebesar 3,965 secara sistematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa apabila nilai dana PNPM (X) dianggap 0 (nol) maka nilai kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar 3,965 satuan.
- 2) Koefisien regresi X (dana PNPM) sebesar 0,437 atau 43,7% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel X (dana PNPM) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 0,437 satuan. Hal ini mengartikan setiap penambahan 1% nilai dana PNPM, maka kesejahteraan masyarakat bertambah sebesar 43,7%. Jadi dari uji yang dilakukan, koefisien regresi tersebut bernilai positif. Maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X (dana PNPM) terhadap Y (kesejahteraan masyarakat) adalah positif. Koefisien bernilai positif berarti terjadinya hubungan positif antara dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika semakin besar (naik) dana PNPM maka akan semakin tinggi (meningkat) kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini adalah:

- a) Berdasarkan nilai signifikan dari tabel diatas diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel dana PNPM (X) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).
- b) Berdasarkan nilai t: diketahui  $t_{hitung}$  sebesar  $3,069 > t_{tabel}$  1,701 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana PNPM (X) berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan atau dilihat dengan koefisien melalui korelasi melalui hasil uji t untuk variabel dana PNPM dan kesejahteraan masyarakat dari perolehan pada pengujian hasil SPSS versi 26 bahwa variabel bantuan modal, diperoleh  $t_{hitung}$  3,069, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,069 > 1,701$ ) maka dapat diartikan bahwa  $H_0$  tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah dan  $H_a$  berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah, hal ini dibuktikan dengan variabel dana PNPM berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah dengan tingkat kepercayaan 0,05. Maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Penelitian ini didukung dengan teori (Sepia,2019:1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan dengan tujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin berupa pinjaman mikro, pada PNPM Mandiri Perdesaan bukan menjadi program keuangan mikro ataupun menjadi lembaga keuangan mikro. Pasalnya, program PNPM Mandiri Perdesaan ini bukan diperuntukkan bagi kepentingan pengelola semata. Program ini juga bukan menjadi milik individu. Namun program ini merupakan program pemerintah yang selalu membangun dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan teori dimana dana PNPM di Nagari batipuah Baruah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nayyirotur Riswah dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarkat (DAPM) Khasanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”

dimana dikatakan bahwa variabel dana DAPM berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Undaan. Dan hasil yang diperoleh bahwa variabel dana DAPM berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan atau dilihat dengan koefisien melalui korelasi melalui hasil uji t untuk variabel dana PNPM dan kesejahteraan masyarakat dari perolehan pada pengujian hasil SPSS versi 26 bahwa variabel bantuan modal, diperoleh  $t_{hitung}$  3,069, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,069 > 1,701$ ) maka dapat diartikan bahwa  $H_0$  tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah dan  $H_a$  berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah, hal ini dibuktikan dengan variabel dana PNPM berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat nagari Batipuah Baruah dengan tingkat kepercayaan 0,05. Maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas tentang dampak dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan masyarakat maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Penulis mengharapkan PNPM Nagari Batipuah Baruah lebih meningkatkan lagi pengelolaan dana dan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima dana tersebut, kemudian PNPM Nagari Batipuah Baruah harus lebih bekerja keras lagi untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat dalam



mengelola atau menjalankan usaha khususnya bagi masyarakat yang kegiatan usahanya berdagang.

2. Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang dampak dana PNPM terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi referensi serta perbandingan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arikunto. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi IV*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bappenas. (2013). *Evaluasi PNPM Mandiri*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor.
- Bram, C. (2015). *Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4 No. 3*, 125.
- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Jibeka*, 29.
- Elvira Handayani Jacobus, d. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19, 4.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gampito, S. M. (2016). *Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Internasional*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: ANDI
- Ihsannudin, W. d. (2013). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Agroekonomika*, 140.
- Irwan. 2015. *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

- Kadir. 2015. *Statistik Konsep, Contoh dan Analisa Data Dengan Program SPSS*. Jakarta : Media Group.
- Lailatussaripah. 2019. Analisa Pola Pengembangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. *Skripsi Lailatussaripah*.
- Murdiansyah, I. (2014, Maret 1). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*. WIGA, 4, 77-78.
- Priyatno, D. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi
- PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan.
- PNPM Mandiri (2008). *Sejarah*. Di akses 2021, dari <http://pnpm.mandiri.org/Sejarah.html>.
- Putri, F. N. (2020). *Pengaruh Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Syariah Simpan Pinjam Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Studi Pada UPK PNPM Perdesaan Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) (SKRIPSI)*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rachmad, E. M. (2015). *Aplikasi Pencatatan Kegiatan PNPM Mandiri Berbasis Web (Studi Kasus : Kecamatan Kamal - Bangkalan)*. *Jurnal Sistem Informasi* , 2, 29.
- Riswah, A. N. (2019) *Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (SKRIPSI)*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Rosni. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. *Jurnal Geografi*, 57.
- Rukmana, F. (2019). *Peran Usaha Kerupuk Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pada Jorong Batu Balang Kabupaten Sijunjung (SKRIPSI)*. Batusangkar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Sepia, W. 2019). *Analisis Pengaruh (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari,*

*Kabupaten Agam di Lihat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (SKRIPSI).*  
Bukittinggi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

Siti Kurnia Widiastuti, d. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal.*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukirno, S. (2007). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Kencana.

Syafruddin, R. (2013). Program Simpan Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol. 1, 2.*

Taufik, A. (2015, Juni). *Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2014.* *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No. 1, 193.*

Tutik, I. d. (2008). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Umar, H. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis Edisi ke 2.*  
Jakarta: Rajawali Pers

Utama, M. K. (2019). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.* *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 848.*

Z, Nofriadi. 2018. *Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Fikih Muamalah (SKRIPSI).* Batusangkar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.